

## IMPLEMENTASI HUKUM HAK CIPTA PADA PENYEDIA LAYANAN KONTEN *MUSIC STREAMING* SPOTIFY DI INDONESIA

Oleh:

Fitri Isni Ridha<sup>1</sup>, Hariyanto, S.H., M.Kn.<sup>2</sup>

### INTISARI

Keberadaan *platform digital* yang masif pada saat ini membuat perubahan dalam industri musik. Musik yang awalnya hanya didengar melalui *Compact Disk* kini dapat didengarkan melalui berbagai *platform digital*, salah satunya ialah Spotify. Keberadaan Spotify membuat musik dapat didengarkan secara global hanya dengan mengunduh aplikasi dan berlangganan atau dengan menggunakan internet. Pangsa pasar yang luas membuat pemusik beramai-ramai mendistribusikan lagunya melalui Spotify. Oleh karena itu, perlu adanya pengawasan hukum di Indonesia agar karya cipta tersebut terlindungi, yakni melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Tujuan dilakukannya penelitian ini ialah untuk menganalisa dan mengetahui; 1) Kedudukan hukum Spotify di Indonesia; 2) Implementasi hukum hak cipta dalam hubungan hukum antara pemegang hak cipta yang memasarkan musiknya di Spotify dengan penyedia Spotify; 3) Upaya penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh oleh Pemegang Hak Cipta dan Penyedia Spotify bila terjadi konflik. Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian normatif empiris. Dikatakan empiris karena berbagai ketentuan hukum dianalisis untuk mendapatkan jawaban, dikatakan empiris karena sebagai fakta dan meneliti berlakunya hukum dalam praktek. Responden penelitian ini ialah Group Band Bravesboy sebagai pemegang hak cipta, Label Euforia digital, dan Believe Music sebagai pihak yang bemitra dengan Spotify.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *pertama*, Spotify sebagai Layanan Over the Top memiliki kewajiban untuk mendirikan Bentuk Usaha Tetap agar dapat beroperasi secara legal di Indonesia, namun legalitas tersebut dilakukan dengan cara lain, yakni melakukan kerja sama dengan operator dalam negeri. *Kedua*, implementasi hukum hak cipta dalam Spotify tidak berjalan maksimal karena LMK belum mampu memungut royalti atas *Performing Right* yang dilakukan oleh Spotify. *Ketiga*, upaya penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan cara penyelesaian melalui KemenkumHAM, Label atau mitra Spotify, dan arbitrase internasional.

**Kata kunci:** Hukum hak cipta, kedudukan hukum, hubungan hukum, upaya penyelesaian sengketa, Spotify.

---

<sup>1</sup> Mahasiswa S1 Konsentrasi Hukum Dagang, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

<sup>2</sup> Dosen Departemen Hukum Dagang, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

## COPYRIGHT LEGAL IMPLEMENTATION IN SPOTIFY MUSIC STREAMING CONTENT SERVICES IN INDONESIA

Oleh:

Fitri Isni Ridha<sup>3</sup>, Hariyanto, S.H., M.Kn.<sup>4</sup>

### ABSTRACT

The massive digital presence platform is currently making changes in the music industry. Music that was initially only heard through Compact Disk can now be heard through various digital platforms, one of which is Spotify. Spotify's presence makes music can be heard globally just by downloading applications and subscribing to or using the internet. The wide market share makes musicians discuss the song through Spotify. Therefore, there is a need for legal protection in Indonesia so that the copyrighted work is protected, namely through Law No. 28 of 2014 concerning Copyright.

The purpose of this research is to analyze and find out; 1) Spotify's legal position in Indonesia; 2) Implementation of copyright law in legal relations between copyright holders who market their music on Spotify and Spotify providers; 3) Dispute resolution efforts that can be taken by the Copyright Holder and Spotify Provider if there is a conflict. The type of research used is empirical normative research. Empirical is said because various legal provisions are analyzed to get answers, said to be empirical because they are facts and examine the validity of the law in practice. Respondents of this study are the Bravesboy Group Band as copyright holders, digital Euphoria Labels, and Believe Music as partners with Spotify.

The results of the study show that first, Spotify as an Over the Top Service has the obligation to establish a Bentuk Usaha Tetap in order to operate legally in Indonesia, but the legality is done in other ways, namely cooperating with domestic operators. Second, the implementation of copyright law in Spotify did not work optimally because LMK had not been able to collect royalties on the Right Performances conducted by Spotify. Third, efforts to resolve disputes can be done through settlement through the KemenkumHAM, Label or Spotify partners, and international abrites.

**Keywords:** Copyright law, legal standing, legal relations, dispute resolution efforts, Spotify.

---

<sup>3</sup> Undergraduate student, Commercial Law Concentration, Faculty of Law Universitas Gadjah Mada

<sup>4</sup> Lecturer in Business Law Department, Faculty of Law Universitas Gadjah Mada